



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI SIKAP NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

Devi Fitria¹; Ujang Jamaludin² ; Febrian Alwan Bahrudin³

¹ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, UNTIRTA Serang-Banten, Indonesia.

Email : devifitria0212@gmail.com

² Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, UNTIRTA Serang-Banten, Indonesia.

Email : ujangjamaludin@untirta.ac.id

³ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, UNTIRTA Serang-Banten, Indonesia.

Email : febrian.alwan@untirta.ac.id

Abstract

Pembelajaran afektif yang tidak optimal akibatnya pembelajaran yang dilakukan lebih menekankan secara kognitif sehingga pasca pembelajaran siswa tidak dapat membiasakan diri untuk berperilaku baik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa proses pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terhadap sikap nilai-nilai antikorupsi. Metode penelitian yang digunakan merupakan kuantitatif menggunakan analisis korelasional dan regresi. Adapun populasi berjumlah 30 orang. Data sebelum uji hipotesis menggunakan langkah uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, dan uji linieritas. Selanjutnya uji signifikansi, uji korelasional, serta uji koefisien determinasi. Adapun hasil hipotesis baik menggunakan penghitungan konvensional dengan menggunakan rumus product moment serta Statistical Program for Social Science (SPSS) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara proses pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terhadap sikap nilai-nilai antikorupsi sebesar 0,565. Selanjutnya untuk melihat tingkat besaran signifikansi dengan uji koefisien determinasi dengan hasil sebesar 31,92%. Nilai-nilai antikorupsi bisa dipengaruhi melalui proses pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk sikap perilaku antikorupsi dengan disertai kurikulum serta proses pengawasan dari berbagai

pihak dan proses evaluasi secara terus menerus

Kata-kata kunci: Pendidikan, Pancasila, Kewarganegaraan, Nilai Sikap, Antikorupsi.

A. Pendahuluan

Korupsi menjadi akar masalah sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berkembangnya korupsi memang sangat pesat serta meluas diberbagai aspek kehidupan masyarakat. Maka dari itu diharapkan cara yang sangat efektif dalam menuntaskan korupsi di Indonesia. Langkah sosialisasi perihal korupsi sudah menjadi budaya yang dilakukan sejak dini, hal ini dapat melalui pendidikantingkat dasar (SD) maupun pendidikan tingkat atas (SMA). Dalam meminimalkan tindak pidana korupsi tentunya hal ini sebagai solusi yang efektif.

Korupsi dianalogikan sebagai polusi yang begitu cepat menyebar luas kesemua penjuru dunia, dengan kata kata lain polusi bisa merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga pada akhirnya manusia mudah untuk jatuh sakit. Melalui Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan mengupayakan adanya materi ajar berupa modul pendidikan antikorupsi baik dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018)

Namun demikian upaya tadi tentu pula belum menjadi jaminan menyebarkan muatan materi pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah (Sutrisno, 2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ialah langkah strategis ditengah upaya pemerintah dalam menciptakan karakter bangsa mulai jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Pendidikan Pancasila merupakan muatan yang harus ada pada kurikulum pendidikan tingkat dasar serta menengah sebagaimana tertuang pada pasal 2, 3 dan 37 undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Sisdiknas, 2023) Maka dari itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi mata pelajaran yang dapat menyampaikan donasi atas berbagai solusi dari krisis yang melanda Indonesia, untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan bisa membiasakan dan memberdayakan siswa agar sebagai warganegara yang cerdas serta baik serta sebagai pemimpin bangsa dan negara Indonesia pada masa depan yang amanah, amanah, cerdas, serta bertanggungjawab. Adapun fungsi Pendidikan Pancasila dan

Devi Fitria

Kewarganegaraan (PPKn) yaitu sebagai mata pelajaran yang mempunyai cita-cita pengokohan kebangsaan serta penggerak pendidikan karakter dalam hal ini ialah karakter antikorupsi. (Muriman et al., 2017)

Dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menanamkan dogma-dogma menyangkut civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions. (Pangalila, 2017) Dalam hal menanamkan dogma-dogma luhur dapat diperkenalkan sejak dini melalui penyisipan sembilan dogma-dogma luhur yang membuat karakter antikorupsi yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, mandiri, sederhana, adil dan peduli dalam beberapa mata pelajaran yang telah ada. Nilai kejujuran penting buat diajarkan guna mengurangi kemerosotan moral yang terjadi pada siswa/i di sekolah.

Nilai-nilai kejujuran usaha sadar menanamkan melalui pendidikan antikorupsi yang memiliki pengetahuan serta persepsi tentang definisi, jenis-jenis korupsi serta usaha yang dapat dilaksanakan untuk berperan dalam memberantas korupsi.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan terjadi perubahan perilaku peserta didik Menengah Atas (SMA) baik itu sikap meninggalkan, memahami, serta memaafkan korupsi ke sikap menolak tindakan korupsi. Doty Rahmatiasih Direktorat Pendidikan serta Pelayanan masyarakat komisi pemberantasan korupsi (komisi pemberantasan korupsi), mengatakan, sifat amanah diyakini efektif mencegah perilaku korupsi, karena jujur artinya perilaku utama buat mencegah adanya korupsi. (Halimah, 2021)

Korupsi bila dianalogikan dalam sudut pandang pendidikan bisa diartikan kegiatan tidak amanah, tidak bertanggungjawab, tidak memiliki keberanian, tidak memiliki keterbukaan dan tidak mempunyai kedisiplinan. Sebagai contoh ada siswa mencontek ketika ulangan atau ujian, membeli makanan di kantin sekolah tetapi pembelian harga tak sesuai menggunakan harga yang sudah ditetapkan, meninggalkan kelas ketika masih jam pelajaran masih berlangsung dan menggunakan uang kas kelas kebutuhan pribadinya. Bila hal ini sudah menjadi norma yang kurang baik, maka hal ini bisa dipastikan bahwa penerus selanjutnya dalam menghasilkan manusia yang unggul, pintar serta bermoral tidak akan tercapai.

Lembaga pendidikan (sekolah) ialah kawasan yang sangat sempurna terkait upaya preventif, melalui jalur pendidikan seseorang siswa akan mengalami proses pengembangan potensi menumbuhkan dan menyebarkan potensi anak menjadi makhluk individu, sosial, susila

Devi Fitria

ataupun religius. Sehingga wajib terorganisasi serta diarahkan menuju tujuan akhir pendidikan yang sudah ditetapkan.

Guna meningkatkan sebuah kualitas SDM, maka dalam menciptakan SDM yang sesuai dengan bangsa Indonesia hanya akan melahirkan dengan catatan sistem pendidikan yang sesuai filosofis bangsa. Untuk itu, upaya untuk melahirkan sistem pendidikan Nasional serta sesuai Pancasila harus terus dilaksanakan dengan semangat secara terus menerus diperbaharui sesuai dengan tuntunan zaman.

Sebagaimana pendapat salah satu guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Puji Astuti mengatakan, bahwa memang pembelajaran afektif belum begitu diterapkan secara optimal, sebab secara umum proses pembelajaran di kelas lebih cenderung bersifat lebih ke kegiatan mental yang membuat siswa/i bisa menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sebagai akibatnya mendapatkan pengetahuan setelahnya, sehingga pasca pembelajaran siswa tidak bisa membiasakan diri untuk berperilaku baik.

Lasmani selaku wakil kepala sekolah SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang berbicara bahwa siswa/i yang mempunyai tanggung jawab beban dengan mata pelajaran yang relatif banyak disertai tugas, kurangnya keterlibatan beberapa siswaterhadap organisasi internal (OSIS), ditambah sistem supervisi sekolah terhadap aktivitas siswa baik dalam aktivitas intrakurikuler juga ekstrakurikuler kurang berjalan dengan baik.

Banyak juga ditemukan bahwa beberapa siswa yang masuk dan keluar ruang Bimbingan Konseling (BK) karena kasus bolos ketika jam pelajaran berlangsung, meminta uang kepada orang tua mengatasmakan kegiatan sekolah, dan lain sebagainya ujar Bapak Ajun sebagai guru Mata Pelajaran PPKn. Hal ini menjadi catatan kurang baik terkait pembentukan karakter siswa/i di sekolah.

Hal ini berdampak pada sikap siswa yang tidak terawasi. Sebagai contoh, melakukan sebuah kecurangan waktu ujian ataupun tes. Maka dari itu pendidikan antikorupsi melalui pengembangan nilai-nilai luhur perlu disemaikan kepada mereka, baik dalam kegiatan intrakurikuler juga ekstrakurikuler. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terhadap sikap nilai-nilai antikorupsi di SMAN 7 Kabupaten Tangerang serta seberapa besar tingkat pengaruh proses pembelajaran, dengan demikian penelitian ini memiliki keterbaharuan Pendekatan yang Holistik: Penelitian terkini cenderung mengadopsi pendekatan yang

Devi Fitria

holistik dalam memahami pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai sikap anti korupsi. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral dan etika dalam pendidikan, pengembangan keterampilan kritis, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan integritas. Kurikulum yang Terintegrasi: Penelitian menunjukkan perlunya mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan. Ini dapat dilakukan dengan mengembangkan materi pembelajaran yang relevan, memperluas pemahaman siswa tentang praktik korupsi, dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam proyek-proyek sosial yang bertujuan untuk memerangi korupsi.

B. Metode

Metode penelitian ini merupakan deskriptif atau kuantitatif, untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Data yang terkumpul dan dianalisis dengan menggunakan metode korelasi. Analisis ini dikembangkan untuk lebih mendalami konsep manajemen sumber daya manusia dan pengaruh kepuasan guru kepala sekolah.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian hasil, peneliti menyajikan data ringkas dengan ikhtisar berupa teks naratif, tabel dan gambar. Dipahami bahwa informasi yang diberikan pada bagian ini hanyalah hasil yang disajikan dan bukan merupakan interpretasi data atau kesimpulan yang diambil dari data yang ada.

Bagian pembahasan meliputi pemaparan makna esensial dari hasil analisa dan perbandingannya dengan temuan sebelumnya berdasarkan hasil kajian yang relevan, terkini dan primer. Perbandingan ini harus merujuk pada perbedaan hasil penelitian sebelumnya untuk menyatakan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

1. Hasil

Uji penerimaan klasik terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis. Uji normalitas Kolumnogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji hipotesis klasik yang digunakan untuk menentukan apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Maka model regresi yang baik memiliki residual yang normal. Berikut adalah hasil uji normalitas:

Tabel 1: Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.59498915
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.059
	Negative	-.073
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200^{c,d}

Hasil uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas yaitu 0,05 (0,200>0,05). Maka, data hasil uji coba normalitas instrumen dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan, berikut ini yaitu hasil uji linieritas :

Tabel 2: Uji Linieritas ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Sikap Nilai-Nilai Antikorupsi * Proses Pembelajaran PPKn	Between Groups	(Combined)	742.200	17	43.659	3.281	.021
		Linearity	289.563	1	289.563	21.763	.001
		Deviation from Linearity	452.637	16	28.290	2.126	.095
	Within Groups		159.667	12	13.306		
	Total		901.867	29			

Devi Fitria

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Deviation from Linearity menunjukkan angka .095 / 0,095. Hal ini membuktikan bahwa nilai signifikansi > 0.05 maka data variabel dinyatakan linier.

Hasil uji hipotesis didapat Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMAN 7 Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

Tabel 3: Daftar Distribusi Frekuensi

Interval Kelas		Frekuensi
53	56	3
57	60	7
61	64	7
65	68	7
69	72	4
73	76	2
JUMLAH		30

Hasil distribusi frekuensi variabel Y yaitu Sikap Nilai-Nilai Antikorupsi di SMAN 7 Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

Tabel 4: Daftar Distribusi Frekuensi

INTERVAL DATA		FREKUENSI
45	48	1
49	52	6
53	56	11
57	60	5
61	64	4
65	68	3
JUMLAH		30

Langkah selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (variabel X) terhadap sikap nilai-nilai antikorupsi (variabel Y), maka dicari angka signifikan r^2 , dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \cdot 100\% \\
 &= (0,565)2.100\% \\
 &= \mathbf{31,92\%}
 \end{aligned}$$

Devi Fitria

2. Pembahasan

Sebagaimana dari hasil penelitian terkait proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terhadap sikap nilai-nilai antikorupsi memiliki pengaruh, melihat dari uji asumsi klasik (normalitas dan linieritas) pada berdistribusi normal dan dinyatakan linier pada kedua variabel. Selain itu, dari hasil uji hipotesis terungkap bahwa variabel atau pembelajaran sebelumnya, pemberian motivasi, membimbing siswa, berpengaruh terhadap skor Nilai antikorupsi Menurut teori Lickona, ada senang tahu (feel good), senang senang (desire). baik) dan berbuat baik (berbuat baik). Pendidikan karakter tidak hanya benar atau salah, tetapi lebih dari itu. Pendidikan karakter mendorong kebiasaan (habits) yang baik pada diri siswa sehingga mereka mengerti, tahu bagaimana merasakan dan mau berbuat baik. Hal ini sejalan dengan teori gagne terkait prinsip proses pembelajaran, diantaranya:

- a. Attention, adalah pembelajaran yang membangkitkan minat siswa dengan menghadirkan sesuatu yang baru, aneh, kontradiktif atau kompleks.
- b. Tujuan pembelajaran mengajar (mengkomunikasikan tujuan kepada siswa), yaitu mengajarkan keterampilan yang harus dikuasai siswa setelah akhir pelajaran atau setelah menerima materi yang disampaikan oleh guru.
- c. Mengingat kembali prinsip-prinsip yang dipelajari (stimulasi memori atau pembelajaran sebelumnya), yaitu stimulasi memori informasi yang dipelajari, yang merupakan prasyarat untuk mempelajari materi baru.
- d. Memberikan materi pelajaran (presenting the stimulus), yaitu menyampaikan secara garis besar materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan.
- e. Memberikan bimbingan belajar (pemberian penunjang belajar), dengan mengarahkan proses berfikir siswa agar lebih memahami kedepannya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membentuk

Devi Fitria

sikap dan perilaku anti korupsi pada individu. Dengan pendekatan yang tepat, pengembangan kurikulum yang relevan, penggunaan teknologi yang bijaksana, evaluasi yang terus-menerus, serta peran aktif guru dan institusi pendidikan, pendidikan ini dapat menjadi alat yang efektif dalam melawan korupsi dan membangun masyarakat yang lebih integritas dan berkeadilan.

G. Daftar Pustaka

- Abdillah, H. 2019, Ilmu Pendidikan. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI)
- Abdullah. 2015, Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Amalia Syauket. 2021, Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi. Bekasi: Ubhara Jaya Press Arikunto Suharsimi. 2014, Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik. Jakarta: RineKa
- Cipta.
- Asep Sahid dan Subhan Sofhian. 2016, Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Fokusmedia
- Asep Sulaiman. 2016, Pendidikan Pancasila dan Kewarngeraan. Bandung: CV. Arfino Raya.
- Dalmeri. 2019, Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter. Journal of Chemical Information and Modeling
- Fuad Ihsan. 2010, Dasar-Dasar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halimah. 2021, Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Kuliah : Tingkatan Dalam Memahami Kejujuran. Pendidikan Anti Korupsi, 5, 1-14.
- Hardani. Ustiawaty, 2017, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2018, Panduan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Guru. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
- Kusnawi Basyir. 2013, Pancasila dan Kewarnegaraan. Surabaya: Mitra Media Nusantara (MMN).
- Moh Yamin. 2016, Pendidikan Antikorupsi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muriman, Supandi, 2017, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi. Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53).

Devi Fitria

- Nanang. 2018, Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti
- Nisfiannoor 2009, Pendekatan statististika Modern untuk Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika
- Nurwardani Paristiyanti. 2016, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum; Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Rahmat. 2013, Pengantar Pendidikan Teori, Konsep, dan aplikasi. Jakarta: Ideas Publishing
- Sugiyono. 2017, Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Supardi. 2017, Statistik Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surachmin dan Cahaya Suhandi. 2015, Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surono dan Hidayati. 2018, Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Jakarta: UAI Press.
- Sutrisno. 2017, Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKn Berbasis Project Citizen di Sekolah Menengah Atas (SMA), Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017
- Ubaedillah. 2013, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani Jakarta: Kencana.
- Usiono. 2016, Pancasila dan Kewarganegaraan. Medan: Perdana Publishing.
- UUD Pendidikan. (2003). UUD No 20 Pendidikan Tahun 2003